

ABSTRAK

PERMOHONAN GRASI OLEH TERPIDANA YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP

Grasi adalah hak prerogatif kepala negara atau pemerintah untuk mengurangi atau menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan kepada terpidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Grasi diberikan sebagai bentuk keadilan dan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap terpidana yang dianggap memiliki alasan yang memadai.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana Legalitas Permohonan Grasi Oleh Terpidana Yang Telah Memperoleh Hukum Tetap Ditinjau Dari Undang-Undang Grasi, 2. Bagaimana Tanggungjawab Terpidana Dalam Permohonan Grasi Yang Ditolak. Sedangkan tujuan untuk 1. Untuk Mengetahui Legalitas Permohonan Grasi Oleh Terpidana Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. 2. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Terpidana Dalam Permohonan Dan Pengajuan Grasi Yang Ditolak.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sesuai dengan masalah tersebut, data yang digunakan penelitian yuridis, penelitian pustaka yang kemudian dianalisis menjadi data yang dapat diterjemahkan dan dapat dimengerti. Teknik penelitian ini menggambarkan secara yuridis normatif yang sesuai dengan interpretasi gramatikal, formal menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah - kaidah hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan 1. Pemberian ampunan/grasi, dalam sistem hukum pidana umum, maka yang berwenang memberikan grasi hanyalah kepala Negara. Tidak ada jalan lain untuk memberikan pengampunan kepada para terpidana yang dalam arti, tindakan kejahatannya tidak terhapus, kecuali dengan menggunakan grasi. Dasar pemberian grasi, berdasarkan analisis peneliti bahwa a. Kepentingan keluarga dari terpidana, b. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat, c. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, d. Terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga pemasyarakatan). 2. Tanggungjawab Terpidana Dalam Permohonan Grasi Yang Ditolak, secara hukum karena telah ada keputusan tetap dari Pengadilan, maka harus dilaksanakan karena pasal 4 ayat (1) Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana, jika permohonannya ditolak harus diikuti putusan pengadilan atas penjatuhan hukumannya.

Kesimpulan a) Legalitas Hukum yang kuat, hal tersebut didasarkan pada Undang-undang Dasar dan grasi. Menunjukkan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. b) Tanggungjawab Terpidana Dalam Permohonan Grasi Yang Ditolak, dalam realitanya hukum tata Negara, seorang Presiden tidak serta merta memberikan grasi bagi seorang terpidana tetapi Presiden harus meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung

Kata Kunci : Grasi, Terpidana dan Kekuatan Hukum

ABSTRACT

CLEMENCY APPLICATION BY TERPIDANA ALREADY HAVE REGULAR LEGAL POWER

Clemency is prerogative rights president or government to reduce or abolishes punishment already be stricken down to terpidana already have regular legal power. Clemency is given as form of justice and humanitarianism that did by government to terpidana that reputed have reason that is equal to.

Problem that is analyzed in this paper is 1. How Clemency application Legality By terpidana Already Get Regular Law is sighted Of Clemency Law, 2. How is terpidana's Responsibility In rejected Clemency application. Meanwhile aim for 1. To Know Clemency application Legality By terpidana Already Get Regular legal power. 2. To Know terpidana's accountability In application And rejected Clemency Proffering.

In answers about problem that, research utilizes research that gets normatif's judicial formality character. According to that problem, data that utilized by judicial formality research, library research is next dianalisis becomes translatable data and get apprehended. This observational tech menggambarkan normatif's judicial formality ala that corresponds to grammatical interpretation, formal terminological quality and its truth, then linked by theories, grounds, and prevailing law method.

Result observationaling to point out 1. Application amnesties / clemency, in common criminal law system, therefore in charge give clemency only president. No other way to give pardon to terpidana that deep mean, its crime action doesn't be erased, but by use of clemency. Clemency application basic, base analisis that researcher a. family behalf from terpidana, b. terpidana has once deserving for society, c. terpidana suffer from incurable, d. Well-behaved terpidana up to is at Correctional Institution). 2. terpidana's responsibility In rejected Clemency application, judicially because have available decision makes a abode from Justice, therefore has dilaksanakan because section 4 sentences (1) President deserve to accede or refuse clemency application that proposed by terpidana, if its application is refused has to be followed by justice verdict on its punishment airdrop.

a's conclusion) Strong Jurisdictional legality, that thing is gone upon on Constitution and clemency. Point out to justice verdict that already have legal power which makes a abode, terpidana can propose clemency application to President. b) terpidana's Responsibilities In rejected Clemency application, deep down it sentences civic, a President not at moment's notice give clemency for a terpidana but President has to ask for judgment of Supreme Court

Key word: Clemency, terpidana and legal power